



Application of the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) Method (Case Study: Household Income Group in South Sulawesi 2016-2018)

Andy Rezky Pratama Syam^{a*}

^aBadan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Jl. Ahmad Yani No. 18, Bulukumba, Indonesia. Email: andyrezkypratama@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze pro-poor growth in South Sulawesi Province with an income dimension approach for the classification of urban and rural areas. This study reveals the poverty situation in South Sulawesi and the extent of the growth of the poor population. In addition, an overview of the effects of growth and distribution effects on changes in poverty is also obtained. Using SUSENAS data from South Sulawesi Province from 2016 to 2018, it was found that growth tends to have a greater impact on reducing poverty in rural areas than in urban areas based on the results of the Shapley decomposition. The results of calculating the degree of pro-poor growth with PEGR, show that income growth tends to be trickle-down from 2016 to 2017. The decline in the poverty rate did occur but the benefits of growth received by the poor were proportionally less than the non-poor. Income growth shows pro poor in the period from 2017 to 2018.

Keywords: Poverty, Pro Poor, Poverty Equivalent Growth Rate

Diserahkan: 25-11-2021; Diterima: 06-06-2022;

DOI: <https://doi.org/10.29303/emj.v5i1.125>

1. PENDAHULUAN

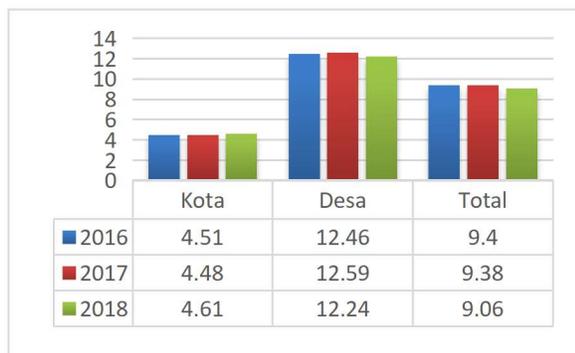
Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah adalah permasalahan kemiskinan. Strategi implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. Topik ini terus berlanjut hingga ke pembahasan tentang bagaimana mendefinisikan atau mengukur pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada penduduk miskin, karena salah satu indikator yang berkaitan erat dengan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pengentasan kemiskinan yang cepat, berkaitan erat dengan strategi 'pro poor growth', yaitu strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan dari masyarakat

miskin (Grimm, et al., 2007). Dengan fokus utama pada masyarakat miskin pada *pro poor growth*, akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat miskin dan distribusi pendapatan akan lebih merata (aspek ekuitas atau equity aspects). Berkurangnya ketimpangan pendapatan atau aspek ekuitas secara langsung akan mengurangi kemiskinan, hal ini kemudian akan memberikan dampak meningkatkan kemampuan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan yang selanjutnya mempercepat pengentasan kemiskinan (Grimm, et al., 2007). Aspek ekuitas dari *pro-poor growth* ini akan memperkuat dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan (Kakwani dan Pernia, 2000).

* Corresponding author.

Alamat e-mail: andyrezkypratama@gmail.com

Menurut Departemen Sosial RI tahun 2005, pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan, selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk diantaranya kaum miskin atau yang disebut dengan pro-poor growth. Gambar 2. menunjukkan keseriusan pemerintah menanggapi masalah kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan persentase penduduk miskin secara signifikan sejak tahun 2016 hingga 2018, yaitu dari 9,4 persen menjadi 9,38 persen, hingga akhirnya menjadi 9,06 persen. Namun, dari Gambar 1 terlihat bahwa ada perbedaan persentase yang cukup jauh antara kota dengan desa, dengan selisih persentase antara kedua wilayah sekitar 8 persen. Apabila diperhatikan lebih lanjut, di wilayah kota sempat terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2017, tetapi kembali meningkat di tahun 2018. Sebaliknya, justru pada tahun 2017 wilayah perdesaan mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan pada tahun 2018 persentasenya menurun.



Gambar 1 - Persentase Kemiskinan menurut Kota dan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018



Gambar 2 - Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018

Ketimpangan pendapatan di Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ukuran indeks gini menunjukkan bahwa secara total ada kecenderungan untuk menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Tren penurunan indeks gini secara total juga dialami oleh

wilayah perkotaan yang selama 3 periode tahun tersebut menunjukkan indeks yang terus menurun. Namun, untuk klasifikasi daerah perdesaan yang menunjukkan penurunan indeks gini pada tahun 2017, ternyata kembali meningkat di tahun 2018 (Gambar 2). Mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa penurunan gini rasio berarti bahwa peningkatan pendapatan tidak melibatkan pemerataan pendapatan. Meski begitu, jika diperhatikan lebih lanjut maka dapat dilihat bahwa indeks gini untuk wilayah perdesaan masih berada di bawah perkotaan.

2. METODE PENELITIAN

Analisis terkait metode *pro poor growth* pernah dilakukan oleh Suparno (2010) dengan data Susenas Modul Konsumsi tahun 2002, 2005 dan 2008. Dalam penelitiannya, untuk melihat seberapa besar growth memberikan manfaat terhadap rakyat miskin, menurut status daerah desa dan kota, digunakan Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) dan Dekomposisi kemiskinan Shapley. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penelitian mengenai *pro poor growth* pernah dilakukan oleh Hajiji (2010) di Provinsi Riau, dengan menggunakan metode *Pro Poor Growth Index* (PPGI) dan dekomposisi kemiskinan Shapley. Sehingga, untuk Penelitian ini, dilakukan kajian tentang *pro poor growth* di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan menurut status kota dan desa.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum dari keadaan kemiskinan, dinamika pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Metode Kuantitatif berupa Metode Dekomposisi Kemiskinan Shapley dan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR). Metode dekomposisi kemiskinan Shapley digunakan untuk menganalisis perubahan kemiskinan karena efek pertumbuhan dan efek distribusi. Sedangkan, metode PEGR digunakan untuk melakukan menganalisis terkait pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak memberikan manfaat bagi penduduk miskin (*pro poor growth*) atau terhadap penduduk tidak miskin (*anti poor*). Dalam melakukan analisis dan pengolahan data, digunakan aplikasi SPSS dan STATA serta aplikasi *Distribution Analysis of Stata Package* (DASP).

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi-Selatan yang diperoleh dari hasil survey SUSENAS. Data yang digunakan untuk mendekati pendapatan rumah tangga adalah besaran pengeluaran dari rumah

tangga tersebut, karena lebih mencerminkan keadaan keuangan sebenarnya dalam rumah tangga tersebut. Pendekatan pengeluaran rumah tangga sangat relevan untuk dijadikan ukuran standar hidup yang layak karena rumah tangga responden dalam survey SUSENAS cenderung lebih mudah mengingat dan melaporkan segala bentuk pengeluarannya dibandingkan pendapatannya.

2.2 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Merupakan metode analisis sederhana dari suatu sebaran data dengan penyajian dalam bentuk tabulasi dan gambar. Dalam penelitian ini, ukuran statistik yang di analisis menggunakan analisis deskriptif adalah persentase pendapatan (yang didekati dengan nilai pengeluaran per kapita) masing-masing kelompok persentil menurut kota dan desa. Karakteristik dari sebaran data persentase tersebut dapat dianalisis dengan bantuan berbagai ukuran statistik. Tahap pertama adalah mengurutkan rumahtangga dari yang pengeluaran per kapitanya paling kecil sampai paling besar untuk masing-masing wilayah kota dan desa. Kemudian membagi frekuensi jumlah rumah tangga tersebut menjadi 10 kelas (persentil) yang sama besar jumlahnya. Setelah itu mencari total pengeluaran untuk masing-masing kelas di kota maupun desa secara terpisah dan membandingkannya dengan total pengeluaran seluruh kelas. Yang terakhir adalah mengelompokkannya menjadi 40 persen penduduk terbawah, 40 persen di tengah, dan 20 persen di atas.

2.3 Dekomposisi Kemiskinan Shapley

Akibat terjadinya Perubahan kemiskinan pada dua periode tertentu akan dapat didekomposisi, hal ini disebabkan karena adanya efek pertumbuhan dan efek redistribusi pendapatan. Sehingga dalam penelitian ini akan digunakan dekomposisi kemiskinan dengan pendekatan *Shapley Value* karena hasil yang diperoleh sudah tidak mengandung unsur residual yang merupakan interaksi efek pertumbuhan dan efek distribusi. Dengan menggunakan dekomposisi kemiskinan Shapley, Perubahan kemiskinan untuk setiap kota dan desa dapat didekomposisi ke dalam efek pertumbuhan dan efek distribusi. Model dekomposisi kemiskinan Shapley dapat dituliskan dalam bentuk normalisasi FGT (Foster-Greer-Thorbecke) sebagai berikut:

$$\Delta P = P_2(z, \alpha) - P_1(z, \alpha) \quad (1)$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \left[\left(P_2 \left(\frac{z\mu_1}{\mu_2}, \alpha \right) - P_1(z, \alpha) \right) + \left(P_2(z, \alpha) - P_1 \left(\frac{z\mu_2}{\mu_1}, \alpha \right) \right) \right] +$$

$$\frac{1}{2} \left[\left(P_2 \left(\frac{z\mu_2}{\mu_1}, \alpha \right) - P_1(z, \alpha) \right) + \left(P_2(z, \alpha) - P_1 \left(\frac{z\mu_1}{\mu_2}, \alpha \right) \right) \right]$$

$P_1(z, \alpha)$: bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT pada awal periode

$P_2(z, \alpha)$: bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT pada akhir periode

$P_1 \left(\frac{z\mu_1}{\mu_2}, \alpha \right)$: bentuk normalisasi ukuran kemiskinan FGT saat terjadi perubahan rata-rata pendapatan dari periode awal ke periode akhir.

2.3 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR)

Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) merupakan salah satu metode statistik yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin, sehingga metode ini dapat digunakan dalam penelitian. Tingkat kemiskinan dari penduduk suatu wilayah dapat diukur berdasarkan rata-rata depresiasi yang dialami oleh penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (z), yang dirumuskan oleh Foster, Greer, dan Thorbecke (1984) pada persamaan berikut:

$$P_\alpha = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha \quad (2)$$

dimana :

y_i = pendapatan (pengeluaran) dari individu ke- i

z = garis kemiskinan

q = jumlah penduduk miskin

α = parameter dengan nilai 0,1,2

Perubahan persentase penduduk miskin pada periode 1 dan periode 2 dapat dituliskan:

$$P_{12} = P_2 - P_1 = \text{Ln}[P(z, \mu_2, L_2(p))] - \text{Ln}[P(z, \mu_1, L_1(p))] \quad (3)$$

Misalkan μ_1 dan μ_2 adalah rata-rata pendapatan penduduk pada periode 1 dan periode 2, maka pertumbuhan pendapatan penduduk (\hat{y}) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{y} = \text{Ln}(\mu_2) - \text{Ln}(\mu_1) \quad (4)$$

Total elastisitas kemiskinan (δ) dapat didekomposisi menjadi elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan pertumbuhan (η) dan elastisitas kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmerataan (ζ).

Persamaan untuk total elastisitas (δ) sebagai berikut:

$$\hat{\delta} = \frac{(\text{Ln}[P(z, \mu_2, L_2(p))] - \text{Ln}[P(z, \mu_1, L_1(p))])}{\hat{y}} \quad (5)$$

dan

$$\hat{\delta} = \hat{\mu} + \hat{\zeta}$$

dimana elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{\eta} = \frac{1}{2\gamma} \left[\ln[P(z, \mu_2, L_1(p))] - \ln[P(z, \mu_1, L_1(p))] + \ln[P(z, \mu_2, L_2(p))] - \ln[P(z, \mu_1, L_2(p))] \right]$$

dan elastisitas distribusi terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{\zeta} = \frac{1}{2\gamma} \left[\ln[P(z, \mu_1, L_2(p))] - \ln[P(z, \mu_1, L_1(p))] + \ln[P(z, \mu_2, L_2(p))] - \ln[P(z, \mu_2, L_1(p))] \right]$$

Sehingga, didapatkan kesimpulan untuk mendapatkan nilai PEGR dengan persamaan berikut:

$$PEGR = \hat{\gamma}^* = (\hat{\delta}/\hat{\eta})/\hat{\gamma} \quad (6)$$

dimana nilai $\hat{\delta}/\hat{\eta}$ adalah nilai *pro poor growth index* (PPGI).

Nilai PEGR dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. $\hat{\gamma}^* = \hat{\gamma}$ artinya pertumbuhan bersifat netral, setiap orang menerima manfaat yang sama secara proporsional dari pertumbuhan
2. $\hat{\gamma}^* > \hat{\gamma} > 0$ artinya pertumbuhan bersifat *pro poor growth*, penduduk miskin lebih banyak menerima manfaat dari pertumbuhan, terjadi penurunan kemiskinan
3. $0 < \hat{\gamma}^* < \hat{\gamma}$ artinya pertumbuhan belum bersifat *pro poor growth*, manfaat pertumbuhan lebih banyak diterima penduduk tidak miskin (ketidakmerataan meningkat), tetapi masih terjadi pengurangan kemiskinan (*trickle down*).
4. $\hat{\gamma}^* < 0 < \hat{\gamma}$ artinya pertumbuhan bersifat *immiserizing*, yaitu terjadi peningkatan kemiskinan
5. $\hat{\gamma} < \hat{\gamma}^* < 0$ artinya pertumbuhan masih bersifat *pro poor* meskipun terjadi peningkatan kemiskinan
6. $\hat{\gamma}^* < \hat{\gamma} < 0$ artinya pertumbuhan bersifat *anti pro poor growth* atau manfaat pertumbuhan yang lebih banyak dinikmati penduduk tidak miskin, kemiskinan meningkat.
7. $\hat{\gamma} < 0 < \hat{\gamma}^*$ artinya pertumbuhan bersifat *strongly pro-poor*, terjadi penurunan kemiskinan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambahan jumlah penduduk mengindikasikan penambahan pula kebutuhan konsumsi secara agregat yang berujung pada urgensi untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kebutuhan konsumsi tersebut. Pertumbuhan perekonomian dimaksudkan sebagai pendapatan yang meningkat, dan dapat didekati dengan 2 pendekatan yaitu pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan wilayah

yang diukur menggunakan PDB atau PDRB menurut harga konstan dan pendekatan rumah tangga yang diukur berdasarkan peningkatan rata-rata pendapatan perkapita dalam periode tertentu.

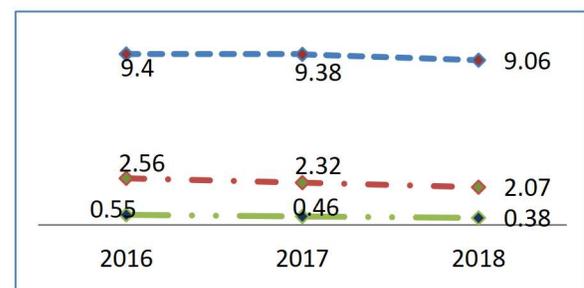
Penurunan angka kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak selalu menjadi dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya merupakan variabel yang saling berkaitan satu sama lain dan kebijakan serta usaha untuk keduanya harus dilakukan secara simultan. Namun dalam penerapannya, harapan yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang signifikan disertai dengan penurunan kemiskinan.



Gambar 3 - Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

Selain usaha untuk meningkatkan pendapatan, usaha untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata juga perlu mendapat perhatian. Penurunan persentase penduduk miskin yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan distribusi pendapatan yang merata merupakan tujuan utama pembangunan. Keseriusan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terkait dengan kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari menurunnya indeks gini seperti yang terlihat dalam Gambar 2.

Indikator lain yang dapat menunjukkan kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2). Berikut ini disajikan grafik perbandingan P0, P1, dan P2 Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai 2018. Berikut disajikan grafik P0, P1, dan P2 Provinsi Sulawesi Selatan.



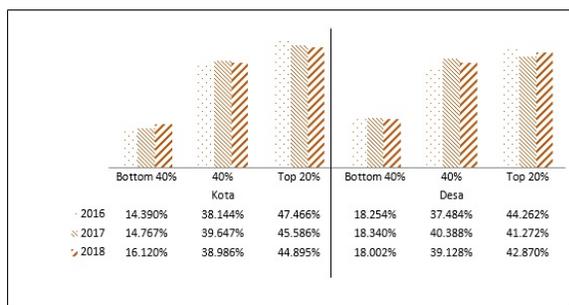
Gambar 4 - Grafik Perbandingan P0, P1, dan P2 Provinsi Sulawesi Selatan

Ada cara lain untuk mendapatkan gambaran tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satunya adalah dengan menghitung seberapa besar pendapatan yang dinikmati oleh penduduk dengan kelompok pendapatan 40 persen terbawah dibandingkan dengan penduduk di kelompok 20 persen teratas.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat pembagian kelas secara *equal* menggunakan data Pengeluaran per Kapita dari mikro data SUSENAS tahun 2016-2018. Dari batas kelas yang sudah didapatkan kemudian mengelompokkan penduduk ke masing-masing kelas (penelitian ini menetapkan 10 kelompok). Setelah itu menghitung total pengeluaran masing-masing kelompok dan dibandingkan dengan total pengeluaran secara keseluruhan sehingga didapatlah persentase pengeluaran untuk kesepuluh kelompok.

Penjelasan *World Bank* tentang inequality menitikberatkan pada perbandingan antara kelompok 40 persen terbawah dengan 20 persen ke atas. Oleh karena itu, dari hasil yang disajikan dalam Lampiran 2 kemudian dibuatlah grafik dengan pembagian penduduk 40 persen terbawah, 40 persen di tengah, dan 20 persen di atas untuk melihat gambaran umum ketimpangan distribusi pendapatan.

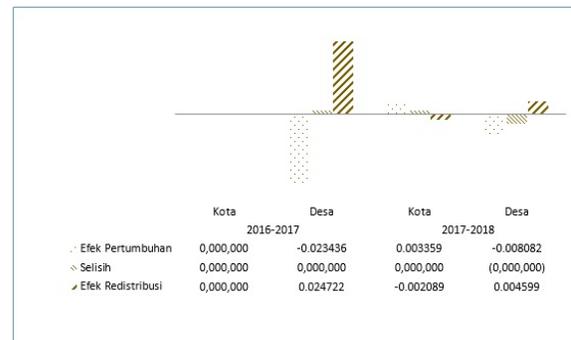
Dari gambar 5, terlihat bahwa 40 persen penduduk terbawah di wilayah perkotaan memiliki persentase yang lebih kecil daripada yang di wilayah perdesaan. Sedangkan persentase di kelompok penduduk 20 persen ke atas wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran per kapita di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di wilayah perdesaan.



Gambar 5 - Persentase Pendapatan Menurut Kelompok Penduduk di Sulawesi Selatan

Lebih spesifik lagi untuk melihat bagaimana efek yang diberikan oleh pertumbuhan dan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini menggunakan dekomposisi kemiskinan Shapley. Penghitungan dekomposisi kemiskinan Shapley dilakukan berdasarkan perubahan pendapatan

perkapita penduduk selama 2 periode, yaitu 2016-2017 dan 2017-2018 yang digunakan untuk menggambarkan efek pertumbuhan dan efek distribusi di setiap periode. Metode ini menggunakan satu garis kemiskinan dalam penghitungan setiap periode, sehingga akan diperoleh perbandingan pola distribusi pendapatan awal dan akhir dari setiap periode. Untuk menyesuaikan pendapatan per kapita, dilakukan deflasi terhadap pendapatan perkapita akhir periode dengan perbandingan garis kemiskinan awal periode dan garis kemiskinan akhir periode untuk kota dan desa.



Gambar 6 - EP, ED, dan net effect Penurunan Kemiskinan Periode 2016-2017 dan 2017-2018

Efek pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan periode 2017-2018 terhadap penurunan tingkat kemiskinan (*net effect*) tidak terasa dibandingkan periode 2016-2017, bahkan justru lebih menaikkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh efek pertumbuhan periode 2017-2018 lebih besar untuk meningkatkan kemiskinan, meskipun efek distribusinya lebih kecil. Sedangkan untuk wilayah perdesaan, dampak *net effect* lebih terasa terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan perkotaan. Meski begitu, efek yang dirasakan di wilayah perdesaan pada periode 2017-2018 terasa lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh penduduk miskin atau tidak digunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR). Berdasarkan data survey SUSENAS di Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018, pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan pada periode 2016-2018 tergolong *trickle down growth*. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi yang dinikmati penduduk miskin di Sulawesi Selatan selama periode 2016-2017 secara proporsional lebih sedikit.

Kondisi tersebut membaik pada periode 2017-2018 karena pertumbuhan ekonomi di kota maupun desa sudah bersifat *pro poor growth*. Artinya, dapat dikatakan bahwa penduduk dengan kategori miskin

memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan penduduk dengan kategori tidak miskin. Berikut disajikan tabel hasil penghitungan PEGR.

Tabel 1 - Indeks Pertumbuhan dan PEGR menurut Kota dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2016-2017 dan 2017-2018

Indeks	2016-2017		2017-2018	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Pertumbuhan	-0,000012	0,052315	-0,02034	0,039435
PEGR-indeks	9,36	-0,00316	-0,00447	0,016783

Sumber : SUSENAS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2018 (diolah)

Perubahan sifat pertumbuhan dari *trickle down* menjadi *pro poor* menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan pada periode 2017-2018 lebih optimal dibandingkan periode 2016-2017.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama 5 tahun terakhir, persentase pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada PDRB di Provinsi Selatan cenderung turun
2. Sejak tahun 2016 sampai 2018, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan secara total mengalami penurunan
3. Selama kurun waktu tahun 2016-2018, ketimpangan pendapatan yang didekati dengan perbandingan pengeluaran per kapita penduduk 40 persen terbawah dengan 20 persen teratas di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di wilayah perdesaan
4. Pada periode 2016-2017 dan 2017-2018, baik pertumbuhan maupun distribusi memberikan efek untuk meningkatkan kemiskinan di wilayah perkotaan. Sebaliknya, *net effect* di wilayah perdesaan justru menurunkan kemiskinan di kedua periode tersebut
5. Pada periode 2017-2018, pertumbuhan baik di kota maupun desa sudah bersifat *pro poor growth* dan *trickle down* setelah di periode sebelumnya bersifat *strongly pro poor* dan *immiserizing growth*.

Beberapa kebijakan yang disarankan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fokus pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga lebih memperhatikan distribusi pendapatan dalam rangka mengurangi

kemiskinan, karena kedua hal tersebut harus dilakukan secara kontinu dan simultan

2. Program dan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya melihat karakteristik antar wilayah yang berbeda satu sama lain, karena karakteristik daerah perkotaan dan perdesaan berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Araar, Abdelkarim and Duclos, Jean-Yves. 2013. *User Manual DASP version 2.3: Distributive Analysis Stata Package*. Universite Laval PEP, CIRPEE and World Bank
- [BPS] Badan Pusat Statistik. Website BPS, berbagai publikasi. www.bps.go.id
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016-2018. *Berita Resmi Statistik*. Sulawesi Selatan
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2018*. BPS. Sulawesi Selatan
- Departemen Sosial RI. 2005. *Pokok-pokok Pikiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2009 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Tahun 2004-2009 Bidang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- Grimm, Michael, Klasen, Stephan, and Mckay, Andrew. 2007. *DETERMINANTS OF PRO POOR GROWTH: Analytical Issues and Findings from Country Cases*. Palgrave, Mcmillan.
- Hajiji, Ajid. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Kemiskinan di Propinsi Riau. [Tesis]. IE-IPB. Bogor.
- Kakwani, Nanak and H. H. Son. 2008. Poverty Equivalent Growth Rate. *The review of Income and Wealth*; Series 54, Number 4, Desember 2008.
- Suhartini, Atik Mar'atis. 2011. *Pro Poor Growth Tingkat Provinsi di Indonesia* [Tesis]. Institut Pertanian Bogor. Jawa Barat
- Suparno. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Pro Poor Growth Policy di Indonesia. [Tesis]. IE-IPB. Bogor
- World Bank. 2019. *Visualize Inequality*. http://www1.worldbank.org/poverty/visualizeinequality/ECA/bottom_40.html